

**STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SAWAHLUNTO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**MUHAMMAD JIHAN AKBAR**  
**NIM/BP : 13616/2009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL KOTA SAWAHLUNTO  
DALAM PENDIDIKAN DASAR**

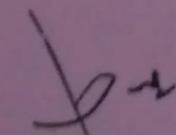
Nama : M JIHAN AKBAR  
TM/NIM : 2009/13616  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2014

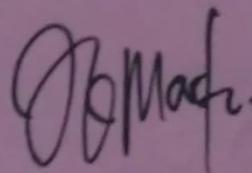
Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

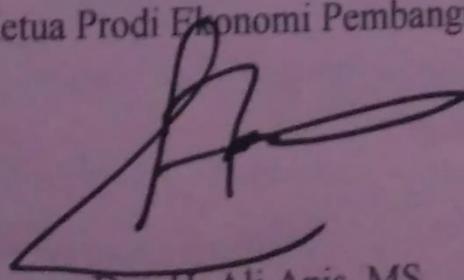


Novia Zulva Riani  
NIP. 197111042005012001



Joan Marta SE, M.Si  
NIP. 198306282008121001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS  
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji*

*Program Studi Ekonomi Pembangunan*

*Universitas Negeri Padang*

**STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL KOTA SAWAHLUNTO  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

NAMA : MUHAMMAD JIHAN AKBAR  
BP/NIM : 2009/13616  
KEAHLIAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS : EKONOMI

PADANG, JUNI 2014

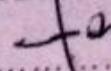
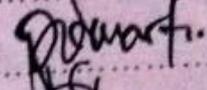
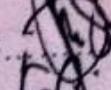
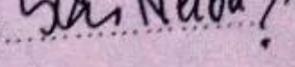
TIM PENGUJI

NO. JABATAN

NAMA

- |               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 1. KETUA      | NOVIA ZULVA RIANI SE, M.Si |
| 2. SEKRETARIS | JOAN MARTA SE, M.Si        |
| 3. ANGGOTA    | DONI SATRIA SE. MSE        |
| 4. ANGGOTA    | SELLI NELONDA SE, M. Sc    |

TANDA TANGAN

1.   
2.   
3.   
4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Jihan Akbar  
Nim/ Tahun Masuk : 13616/2009  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sawahlunto/ 17 Mei 1991  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Cendrawasih, Gang Pari No. 10  
No. HP/telp. : 081286120165  
Judul Skripsi : Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sawahlunto dalam Bidang Pendidikan Dasar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juni 2014  
Yang Menyatakan



M. Jihan Akbar  
Nim/Bp. 13616/2009

## ABSTRAK

**Muhammad Jihan Akbar (13616/2009): Strategi Pencapaian Standar Minimal Kota Sawahlunto dalam Bidang Pendidikan Dasar. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibu Novya Zulfa Riani SE, M.Si dan Bapak Joan Marta SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto berdasarkan analisis SWOT; (2) Untuk mengetahui strategi dalam mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto agar sesuai dengan kondisi ideal/ sesuai standar minimum.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, kuisioner . Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Analisis SWOT dengan menggunakan IFAS ( *Internal factors Analysis Summary*) dan EFAS ( *External factors Analysis Summary*) serta pengambilan keputusan ditentukan oleh matriks space analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor kekuatan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto bernilai kuat; (2) Faktor kelemahan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto bernilai lemah; (3) Faktor peluang sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto bernilai kuat; (4) Faktor Ancaman sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto bernilai lemah. Dan Berdasarkan analisis matriks space analysis, untuk mencapai standar minimum dalam bidang pendidikan dasar, Kota Sawahlunto harus menggunakan strategi SO, yaitu menggunakan peluang untuk memaksimalkan kekuatan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan Bagi pemerintah, untuk menargetkan pencapaian SPM pendidikan dasar, semua elemen masyarakat harus saling bekerjasama untuk mewujudkannya. Karena anak-anak adalah calon generasi penerus bangsa dan apabila sudah mencapai kondisi ideal, selalu agar jaga pada kondisi tersebut, agar kualitas pendidikan selalu terjaga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pencapaian Standar Minimal Kota Sawahlunto dalam Bidang Pendidikan Dasar”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang kepada Ibu Novia Zulva Riani SE, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Joan Marta SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Doni Satria SE, MSE dan Ibu Selli Nelonda SE, M.Sc selaku Penguji Skripsi yang akan memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan penulisan skripsi.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan buat Nenek, Kakek, semua Mama dan Papa yang penulis cintai serta Abang dan Adik penulis yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2009 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	11
A. Landasan Teori .....	11
1. Pelayanan Publik .....	11
2. Standar Pelayanan Minimal.....	14
3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .....	16
4. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar .....	18
5. Arahana Pendidikan menurut Dirjen Dikdasmen .....	24
B. Penelitian Sejenis .....	27
C. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
1. Analisis SWOT .....	32
2. Matriks SWOT.....	36
3. Matriks Space Analisis .....	39
E. Defenisi Operasional.....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>42</b>
1. Letak Geografis Kota Sawahlunto .....	42
2. Deskripsi Penelitian .....	44
<b>B. Pembahasan Analisis SWOT .....</b>	<b>52</b>
1. Strength-Opportunities .....	54
2. Strength-Threat .....	56
3. Weakness-Opportunities .....	58
4. Weakness-Threat .....	59
5. Strategi Unggulan .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Capaian Sarana dan Prasarana Menurut Kab/Kota di Kota Sawahlunto ...	6
2. Capaian Sarana dan Prasarana Menurut Satuan Pendidikan .....	7
3. Matriks EFAS .....	33
4. Matriks IFAS .....	35
5. Matriks Analisis SWOT.....	38
6. Gambaran Prasarana Pendidikan Dasar Kota Sawahlunto .....	45
7. Kekuatan Sarana dan Prasarana di Kota Sawahlunto Berdasarkan Tabel IFAS.....	48
8. Kelemahan Sarana dan Prasarana di Kota Sawahlunto berdasarkan Tabel IFAS.....	49
9. Peluang Sarana dan Prasarana di Kota Sawahlunto berdasarkan Tabel EFAS.....	50
10. Ancaman Sarana dan Prasarana di Kota Sawahlunto berdasarkan Tabel EFAS.....	51
11. Matriks Analisis SWOT Pencapaian Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kota Sawahlunto .....	53
12. Analisis Matriks Space Dalam Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kota Sawahlunto.....	61

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Sawahlunto dengan Analisis SWOT.....	29
2. <i>Matriks Space Analysis</i> .....	40
3. Hasil Analisis Strategi <i>Matriks Space</i> .....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga Negara Indonesia. Untuk itu pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk menciptakan dunia pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman serta untuk menyukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun atau pendidikan untuk semua anak.

Fungsi utama sekolah adalah membina dan mengembangkan semua potensi individu terutama pengembangan semua potensi individu terutama pengembangan potensi fisik, intelektual, dan moral setiap peserta didik. Maka sekolah harus dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk mengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber daya manusia

Pendidikan merupakan dasar dari kemajuan bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, pembangunan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpendidikan, selain orang itu berpendidikan

dia harus mempunyai mental yang bagus untuk menghadapi perubahan.

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun disemangati oleh seruan Internasional *Education For All*, yang diumumkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil *World Education Forum* di Dakar Senegal Tahun 2000. Sejalan dengan diumumkannya *Education For All* oleh UNESCO, Negara Indonesia menerapkannya melalui semangat dan jiwa UUD 1945 dalam pasal 31 tentang hak setiap warga Negara untuk memperoleh memperoleh pendidikan.

Berkaitan dengan hal diatas, proses pendidikan bertujuan untuk menghasilkan output yang berkualitas, output yang berkualitas tidak terjadi begitu saja apabila tidak ada pendidikan. Perlu suatu strategi yang efektif dan efisien. Kualitas pendidikan didasari oleh penyusunan pelaksanaan rencana yang matang serta penerapan yang sempurna dari perencanaan tersebut.

Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pada pasal 45 Tentang Sarana dan Prasarana berbunyi (1) setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (2) ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tersebut lahirlah Standar sarana dan prasarana pendidikan yang disebutkan dalam Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007. Pada pasal 1 disebutkan “Standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madsrasah Aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum dan prasarana”. Ini artinya sekolah-sekolah harus memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan di Kota/ Kabupaten setempat. Dapat dilihat pada Peraturan menteri tersebut ada satuan pendidikan tingkat SMA/MA, pada penelitian ini satuan pendidikan SMA/MA tidak dimasukkan, karena peneliti hanya meneliti tentang pendidikan dasar, yaitu SD/MI dan SMP/MTs.

Penghitungan sarana dan prasarana ada pada Standar Pelayanan Minimal Menurut Permen No. 15 Tahun 2010, sebelumnya SPM ini dibagi menjadi 2 pembahasan, 26 indikator pencapaian, dan 6 jenis pelayanan, pembahasan di SPM ada menurut Kabupaten kota dan Menurut satuan pendidikan. 6 jenis pelayanan terdiri dari: sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, penjamin mutu pendidikan, manajemen sekolah dan penilaian pendidikan. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti

tentang jenis pelayanan sarana dan prasarana pada pembahasan menurut Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan, jumlah total indikator pencapaian sarana dan prasarana dalam 2 pembahasan ini ada 6. Target pencapaian penuh yang ingin dicapai ada pada tahun 2014. Dalam SPM ada tingkat pencapaiannya, tingkat pencapaian ini satuannya adalah persentase.

Proses pendidikan yang baik memerlukan sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas, Sarana dan Prasarana Pendidikan diharapkan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada pembentukan kualitas proses belajar mengajar pendidikan dasar kota Sawahlunto, afektif maupun keterampilan, dan ini juga menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik agar kualitas proses dan hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkesinambungan untuk membangun pendidikan secara terpadu baik pada tataran kebijakan sistem secara nasional, tataran institusi, tataran manajerial dan tataran teknis, sehingga terdapat sinkronisasi serta integritas serta sinergitas diantara tataran-tataran tersebut.

Apabila sekolah tidak mempunyai cukup sarana dan prasarana yang memadai tentu akan banyak kendala yang terjadi di sekolah tersebut. Misalnya sekolah tersebut tidak mempunyai lapangan yang luas, hal ini akan menyebabkan tidak cukupnya lapangan untuk menampung murid untuk upacara apabila jumlah murid banyak, begitupun pada saat mata pelajaran

olahraga, lapangan yang sempit akan menghalangi kegiatan murid untuk bermain bola atau bermain basket. Pada saat sekarang ini teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia, dimanapun kita berada disana ada teknologi, jarang sekali daerah yang tidak ada menerapkan teknologi, kecuali daerah yang mempunyai adat yang kuat untuk menghindari adanya teknologi demi menjaga kelestarian alam, sekolah-sekolah saat ini harus mempunyai sarana dan prasarana yang berbasis teknologi. Teknologi ini berguna untuk menghemat biaya dan mempercepat pembelajaran. Contohnya laptop dan proyektor di sekolah-sekolah, dengan adanya proyektor maka guru tidak begitu mementingkan lagi papan tulis, karena guru sudah menyiapkan bahan dengan *Microsoft power point* dari rumah dan guru hanya tinggal presentasi tentang apa yang ditulis nya tadi.

SPM ini sangat berguna bagi pendidikan di Indonesia, karena dengan SPM kita bisa mencapai mutu pendidikan yang berkualitas, contohnya dalam hal standar pelayanan sarana dan prasarana dengan pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah guru dan jumlah kelas sangat perlu ditentukan jumlahnya agar murid bisa serius belajar, seperti menurut (Elfindri, 2003), “ Di satu sisi, rasio guru dengan murid, dan rasio murid dengan kelas menjadi lebih kecil sehingga terjadi peningkatan input pendidikan. Dengan rasio yang rendah itu diharapkan masing-masing murid mendapatkan eksternalities guru dan ruangan yang semakin besar”. Jadi di samping pendidik dan tenaga

kependidikan, jumlah dan ukuran ruangan ikut mempengaruhi peningkatan input pendidikan . Berikut Tabel capaian SPM dengan jenis pelayanan sarana dan prasarana dari bidang pendidikan dasar menurut Permen Diknas No. 15 tahun 2010 menurut kabupaten/Kota dan Menurut Satuan Pendidikan yang ada di Kota Sawahlunto:

**Tabel 1.1**

**Capaian Sarana dan Prasarana Menurut Kab/Kota di Kota Sawahlunto**

Nomor	Indikator Pencapaian	Tingkat Pendidikan	Capaian		
			2010	2011	2012
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs	SD/MI	55,41%	55,41%	55,41%
		SMP/MTs	54,06%	54,06%	54,06%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD/MI	100%	100%	100%
		SMP/MTs	100%	100%	100%
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP/MTs	43,33%	51,67%	52,67%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD/MI	100%	100%	100%
		SMP/MTs	100%	100%	100%

*Sumber: Data diolah dari Diknas Kota Sawahlunto*

Dapat kita lihat pada Tabel 1.1, masih ada indikator pencapaian yang masih belum mencapai 100%. Pada indikator pencapaian pertama angkanya

yaitu 55,41%, dari tahun 2010 sampai tahun 2010 angkanya tetap tidak ada perubahan, masih banyak murid SD/MI dan SMP/MTs yang jaraknya jauh untuk pergi sekolah. Pada indikator pencapaian kedua angka capaiannya sudah mencapai 100%, ini berarti capaian dalam pemenuhan rombongan belajar serta meja kursinya sudah mencukupi. Pada indikator pencapaian ketiga angkanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tapi masih belum mencapai 100%, ini berarti masih ada SMP/MTs yang masih belum membangun gedung laboratorium serta alat peraganya. Untuk indikator pencapaian keempat angkanya sudah mencapai 100%, ini berarti ruang kepala sekolah dan ruang guru serta meja dan kursi sudah mencukupi.

Tabel 1.2

## Capaian Sarana dan Prasarana Menurut Satuan Pendidikan

Nomor	Indikator Pencapaian	Tingkat Pendidikan	Capaian		
			2010	2011	2012
1	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD/MI	100%	100%	100%
2	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD/MI	100%	100%	100%
		SMP/MTs	100%	100%	95,46%

*Sumber: Data diolah dari Diknas Kota Sawahlunto*

Dapat kita amati pada Tabel 1.2, pada indikator pencapaian pertama angkanya dari tahun 2010-2012 sudah mencapai 100%, ini artinya SD/MI sudah memiliki satu set peraga IPA yang mencukupi. Pada indikator pencapaian kedua tingkat SD/MI sudah mencapai 100% dari tahun 2010-2012 ini artinya SD/MI sudah mempunyai cukup buku pengayaan dan referensi, pada tingkat SMP/MTs awalnya yaitu tahun 2010-2011 angkanya sudah mencapai 100%, tapi pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 95,46%, ini artinya SMP/MTs masih belum mempunyai buku pengayaan dan buku referensi yang lengkap.

Ada *GAP* yang besar disini, antara kondisi sarana dan prasarana dan prasarana yang ada di Sawahlunto dengan kondisi idealnya yaitu 100%, *GAP* yang paling timpang adalah *GAP* yang ada di pembahasan SPM menurut Kabupaten/Kota, untuk itu perlu strategi-strategi yang efektif dan efisien agar kondisi sarana dan prasarana di Kota Sawahlunto bisa mencapai kondisi yang ideal, strategi-strategi itu akan bisa kita analisis dengan analisis SWOT, yaitu analisis yang membahas tentang penggabungan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada sarana dan prasarana di Kota Sawahlunto.

Peneliti tidak hanya membuat strategi yang bergantung pada adanya indikator pencapaian pada Tabel SPM diatas, tapi akan ada sedikit pengembangan dari strategi-strategi yang akan dibuat, kita ketahui pada Tabel SPM diatas tidak dimasukkan adanya kantin, perpustakaan, musholla, toilet,

ruang komputer dan juga sarana dan prasarana lainnya. Maka dari itu peneliti akan memasukkan item-item tersebut dengan strategi-strateginya agar sarana dan prasarana di Kota Sawahlunto akan lebih lengkap dan maksimal lagi.

Dari adanya masalah diatas maka penulis tertarik membuat penelitian tentang **“Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Sawahlunto”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto berdasarkan analisis SWOT ?
2. Bagaimana strategi dalam mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto agar sesuai dengan kondisi ideal/ sesuai standar minimum ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto berdasarkan analisis SWOT.
2. Untuk mengetahui strategi dalam mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sawahlunto agar sesuai dengan kondisi ideal/sesuai standar minimum.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP)
2. Manfaat secara teoritis, pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Ekonomi Pembangunan.
3. Bagi pemerintah Kota Sawahlunto sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pendidikan dasar.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pelayanan Publik**

Banyak orang yang mendefinisikan pelayanan publik, menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa.

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB, pelayanan administrasi

kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian)

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, air bersih, pelayanan telepon.

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pendidikan.

Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur Negara tentang pelayanan publik tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa

kalau kinerja pelayanan publik instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparaturnya pelayanan publik harus berorientasi kepada publik.

Pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, tapi bisa juga dilaksanakan oleh swasta. Sebaiknya pemerintah juga memberikan pelayanan publik kepada swasta agar masyarakat bisa memilih. Mereka (swasta) bisa bersaing disana untuk menjadi yang terbaik untuk melayani publik, bahkan sebagian besar pelayanan publik sebaiknya diberikan kepada swasta agar pemerintah bisa agak ringan kerjanya dan bisa mendapatkan pendapatan dari pajak yang didapatkan dari swasta tersebut.

Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik, David Osborne ( dalam Abdul Rasyid, 1996) menyimpulkan 10 prinsip yang disebut sebagai keputusan gaya baru. Salah satu prinsip penting dalam keputusannya “sudah saatnya pemerintah berorientasi “pasar” untuk itu diperlukan pendobrakan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian pasar itu sendiri”.

Kesepuluh prinsip yang dimaksud Osborne (1997), adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh
2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani

3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.
4. Pemerintahan yang digalakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan peraturan.
5. Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan
6. Pemerintah yang berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan
8. Pemerintah antisipatif: mencegah daripada mengobati
9. Pemerintahan desentralisasi.
10. Pemerintahan birokrasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.

Pelanggan adalah raja, segala upaya harus dilakukan demi puasnya pelanggan yang dilayani, jangan sampai sistem kita sampai merugikan pelanggan. Pelanggan adalah penentu puncak sifat dan keberhasilan organisasi seseorang, suatu pandangan yang memutarbalikkan pandangan tradisional tentang organisasi. Perspektif ini adalah perspektif pelayanan pelanggan.

## **2. Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005. Menurut Pasal 1 ayat 6 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan penerapan Standar Pelayanan minimal diatur oleh peraturan pemerintah yang sama dengan pasal 9 yang berbunyi:

1. Pemerintahan daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
2. SPM telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan menteri
4. Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renaj SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dibahas oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/ Kota. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut prinsip-prinsip Standar Pelayanan Pendidikan ada 6 macam, yaitu :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu
4. Merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya.
5. Bersifat dinamis. Artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat

6. Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 6 Tahun 2007, proses penyusunan SPM di bidang pendidikan di Kabupaten/Kota melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji Standar Pelayanan Minimal yang sudah ada
2. Mengkaji Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berisi delapan standar pendidikan, yang mencakup baik standar teknis maupun pelayanan, serta hasil kajian internasional
3. Menganalisis komponen-komponen SNP dan memilih komponen yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian mutu pendidikan.
4. Menganalisis dampak kelembagaan dan personil
5. Mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah
6. Menyusun rancangan SPM
7. Menganalisis pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah ( dampak keuangan)
8. Menganalisis data dan informasi yang tersedia
9. Melakukan konsultasi dengan sector-sektor terkait dan daerah

10. Menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional

SPM Pendidikan Dasar di kabupaten/kota mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota
2. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

Dalam dua kelompok pelayanan ini ada lima jenis pelayanan, yaitu: sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, penjamin mutu pendidikan, kurikulum, dan penilaian pendidikan.

#### **4. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar**

Standar sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Pada skripsi ini penulis meneliti standar sarana dan prasarana untuk sekolah tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Pertama akan dibahas tentang Ketentuan sarana dan prasarana untuk SD/MI. Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang kelas

2. Ruang perpustakaan
3. Laboratorium IPA
4. Ruang pimpinan
5. Ruang guru
6. Tempat beribadah
7. Ruang UKS
8. Jamban
9. Gudang
10. Ruang sirkulasi
11. Tempat bermain/berolahraga

Ruang kelas dilengkapi sarana sebagai berikut: Kursi Peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, meja guru, lemari, rak hasil karya peserta didik, papan panjang, alat peraga, papan tulis, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik.

Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagai berikut: buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lain, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, meja kerja, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia, peralatan multimedia, buku inventaris, tempat sampah, soket listrik, jam dinding

Laboratorium IPA dilengkapi sarana sebagai berikut: lemari, model kerangka manusia, model tubuh manusia, globe, model tata surya, kaca pembesar, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa datar, lensa cekung, lensa cembung, magnet batang, poster IPA.

Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, papan statistik, simbol kenegaraan, tempat sampah, mesin ketik, filling cabinet, brankas, jam dinding.

Ruang guru dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi kerja, meja kerja, lemari, papan statistik, papan pengumuman, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, penanda waktu.

Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagai berikut: lemari, perlengkapan ibadah, jam dinding. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagai berikut: tempat tidur, lemari, meja, kursi, catatan kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K, tandu, obat-obatan, timbangan badan, tensimeter, pengukur tinggi badan, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding.

Jamban dilengkapi sarana sebagai berikut: kloset jongkok, tempat air, gayung, gantungan pakaian, tempat sampah. Gudang dilengkapi sarana sebagai berikut: lemari, dan rak. Sarana berikutnya ruang sirkulasi, tempat bermain olahraga dilengkapi sarana sebagai berikut: tiang bendera,

bendera, peralatan bola voli, peralatan sepak bola, peralatan senam, peralatan atletik, peralatan seni budaya, peralatan keterampilan, pengeras suara, tape recorder.

Selanjutnya berikut prasarana untuk pendidikan tingkat SMP/MTs, sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang kelas
2. perpustakaan
3. Ruang laboratorium IPA
4. Ruang pimpinan
5. Ruang guru
6. Ruang tata usaha
7. Tempat beribadah
8. Ruang konseling
9. Ruang UKS
10. Ruang organisasi kesiswaan
11. Jamban
12. Gudang
13. Ruang sirkulasi
14. Tempat bermain/olahraga

Ruang kelas dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, meja guru, lemari, papan panjang, papan tulis, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik.

Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagai berikut: buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lain, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja/sirkulasi, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia, peralatan multimedia, buku inventaris, tempat sampah, soket listrik, jam dinding.

Ruang laboratorium IPA dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi, meja peserta didik, meja demonstrasi, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, bak cuci, mistar, jangka sorong, timbangan, stopwatch, rol meter, thermometer, gelas ukur masaa logam, multimeter, batang magnet, globe, model tata surya, garpu tala, bidang miring, dianamometer, katrol, cawan penguapan, kaki tiga, plat tetes jam dinding, dan tempat sampah.

Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, papan statistik, simbol kenegaraan, tempat sampah, jam dinding.

Ruang guru dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi kerja, meja kerja, lemari, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding.

Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagai berikut: kursi kerja, meja kerja, lemari, papan statistik, komputer, filling cabinet, brankas, telepon, jam dinding, soket listrik, penanda waktu, tempat sampah.

Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagai berikut: lemari, perlengkapan ibadah, jam dinding. Ruang konseling dilengkapi sarana sebagai berikut: meja kerja, kursi kerja, kursi tamu, lemari, papan kegiatan, instrument konseling, buku sumber, media pengembangan kepribadian, jam dinding.

Ruang UKS dilengkapi sarana sebagai berikut: tempat tidur, lemari, meja, kursi, catatan kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K, tandu selimut, tensimeter, thermometer badan, timbangan badan, pengukur tinggi badan, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding.

Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana sebagai berikut: meja, kursi, papan tulis, lemari. Jamban dilengkapi sarana sebagai berikut: kloset jongkok, tempat air, gayung, gantungan pakaian, tempat sampah. Gudang dilengkapi sarana sebagai berikut: lemari, rak. Sarana berikutnya ada ruang sirkulasi. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana

sebagai berikut: tiang bendera, bendera, peralatan bola voli, peralatan sepak bola, peralatan bola basket, peralatan senam, peralatan atletik, peralatan seni budaya, peralatan keterampilan, pengeras suara, dan tape recorder.

## **5. Arahannya Pendidikan Menurut Dirjen Dikdasmen**

1. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
2. Salah satu prioritas pembangunan pendidikan adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia, yang targetnya adalah semua warga Negara Indonesia berpendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik.

3. Sesuai dengan target penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pada tahun 2008 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah dapat dituntaskan dengan APK 96.18% dan APM 73.69%
4. Semangat Otonomi Daerah memberikan dampak mendasar terhadap kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan sehingga ada pembaharuan sistem pendidikan secara menyeluruh. Pembaharuan sistem pendidikan nasional tersebut perlu juga disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
5. Kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut peningkatan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya termasuk menyusun strategi pembiayaan dimana Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu merupakan salah satu prioritas Pembangunan Pendidikan di Indonesia.
6. Terkait dengan strategi pembiayaan, tekad pemerintah untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat besar, hal ini terlihat dalam pasal 31 UUD 1945, bahkan dalam perubahan pasal 31 UUD 1945, tekad tersebut makin diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Prosentase tersebut juga dimandatkan untuk dialokasikan oleh setiap daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru ( UU No. 20 Tahun 2003) ditegaskan dalam pasal 49 ayat 1 bahwa : Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Pembangunan daerah termasuk pembangunan pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilaksanakan atas desentralisasi dan dekonsentrasi. Oleh karena itu dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun perlu kerjasama sinergis antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten-kota. Di samping itu pengembangan pendidikan perlu dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat.

## **B. Penelitian Sejenis**

Untuk hasil yang maksimal perlu adanya sebuah penelitian terdahulu yang diambil dari penelitian para ahli atau penelitian dosen. Hal ini juga sebagai panduan untuk menentukan arah penelitian agar tidak keluar jalur.

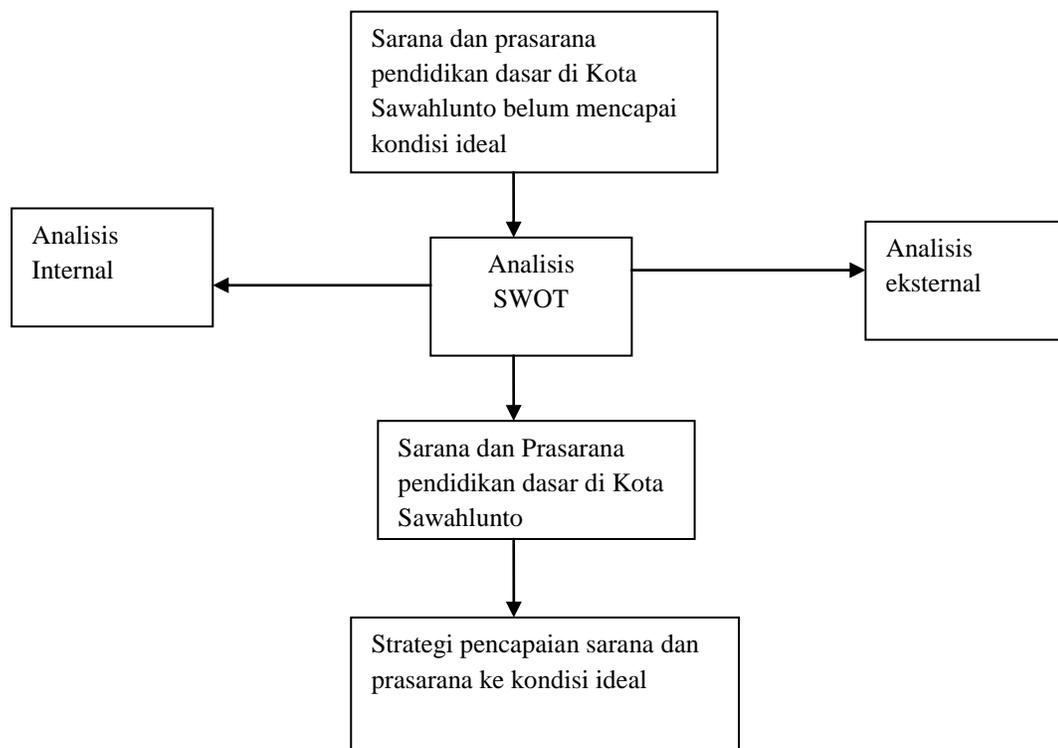
Penelitian Herwin, ST (2012) yang berjudul, "Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar", yang daerah penelitiannya bertempat di Kabupaten Solok Selatan Kecamatan Sangir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan saat ini berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner dan wawancara, dan alat analisis yang digunakan adalah analisis GAP. Analisis GAP ditujukan untuk melihat kondisi riil pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dengan menggunakan indicator-indikator yang terdapat dalam SPM (Permendiknas No. 15 Tahun 2010), hasil dari penelitian ini adalah 1) jumlah sekolah sudah mencukupi untuk pendidikan dasar Sembilan tahun di Kecamatan Sangir

2) Terjadi kekurangan ruang kelas baik di SMP maupun di SD 3) jumlah guru sudah berlebih di Kecamatan Sangir 4) guru di SMP rata-rata sudah sarjana sedangkan di tingkat SD masih ada yang belum menjadi sarjana 5) kepala sekolah di SMP sudah sarjana, sedangkan di SD masih ada kepala sekolah yang belum sarjana 6) kualifikasi pengawas di SD maupun di SMP sudah memiliki ijazah S1 atau D4 7) buku pelajaran di tiap SMP dan SD masih ada yang belum terpenuhi 8) alat peraga IPA di tingkat SD terpenuhi 78%.

Selanjutnya penelitian Herpikus yang berjudul “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Dasar penelitian ini adalah Mendiknas Nomor 15 Tahun 2010, data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif, kualitatif didapatkan dengan observasi langsung, wawancara yang mendalam, dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) persentase tertinggi kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi S1 ada pada kecamatan Entikong yaitu 35,29% dan yang terendah ada pada kecamatan Jangkang yaitu mencapai 16,21% (2) persentase guru tertinggi yang memenuhi kualifikasi S1 ada pada kecamatan Entikong yang mencapai 35,29% dan terendah ada pada Kecamatan Balai yang hanya mencapai 12,90% (3) Persentase sarana dan prasarana tertinggi ada pada Kecamatan Kapuas yaitu mencapai 78,20% dan terendah di Kecamatan Toba dengan angka 42,68%.

### C. Kerangka konseptual

Seperti kita ketahui, Analisis SWOT terdiri dari faktor internal yaitu berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman, berikut gambaran kerangka konseptual Analisis SWOT dengan faktor internal dan eksternal atau IFAS dan EFAS:



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Sawahlunto dengan Analisis SWOT**

Dapat kita lihat pada gambar diatas awalnya sarana dan prasarana belum mencapai kondisi ideal, dengan adanya penerapan strategi dengan analisis SWOT yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, maka bisa

kita lanjutkan dengan membuat strategi-strategi agar sarana dan prasarana di Kota Sawahlunto bisa mencapai kondisi ideal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Kekuatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Kota Sawahlunto berdasarkan analisis SWOT sudah bernilai kuat, ini menjadi potensi untuk meningkatkan sarana dan prasarana dari yang sebelumnya berada di bawah Standar Pelayanan Minimal menjadi Setara dengan Standar Pelayanan Minimal
2. Kelemahan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar Kota Sawahlunto berdasarkan analisis SWOT sudah bernilai lemah, ini berarti kelemahan tidak menjadi halangan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Kota Sawahlunto ke kondisi ideal.
3. Peluang sarana dan prasarana pendidikan dasar Kota Sawahlunto berdasarkan analisis SWOT sudah bernilai kuat, peluang ini menjadi nilai tambah untuk mendukung factor kekuatan yang sudah bernilai kuat tadi untuk meningkatkan sarana dan prasarana Kota Sawahlunto menuju kondisi ideal.
4. Ancaman sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Kota Sawahlunto

berdasarkan analisis SWOT sudah bernilai lemah, hal ini menunjukkan ancaman yang ada tidak perlu terlalu dikhawatirkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar Kota Sawahlunto ke kondisi ideal.

5. Berdasarkan analisis matriks *Grand Strategy*, maka *action plan* dalam penelitian ini adalah strategy *Strength-Opportunities* (SO)

## **B. SARAN**

1. Untuk mengejar target pada tahun 2014 dalam pencapaian SPM pendidikan dasar, semua elemen masyarakat harus saling bekerjasama untuk mewujudkannya. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
2. Apabila sudah tercapai kepada kondisi ideal, selalu jaga agar berada pada kondisi tersebut, agar kualitas pendidikan selalu terjaga, bila sudah ada kemampuan kota untuk menjaga, maka dengan sedikit tambahan dana dan kebijakan maka kualitas bisa ditingkatkan melebihi kondisi ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid, Abdul. 1996. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Endarti, Esa Wahyu. 2006. Standar Pelayanan Minimum Dalam Sektor Publik. Di unduh dari <http://e.pascasarjanauwp.com/files/80c79f8a9735e4e0e1b0583224fae16b.pdf> pada tanggal 15 April 2014
- Elfindri.2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: Universitas Andalas
- Herfikus.2012. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Sanggau. Di unduh dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/8/7> pada tanggal 2 juli 2014.
- Herwin.2012. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Di unduh dari <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PENCAPAIAN-STANDA-PELAYANAN-MINIMAL.pdf> pada tanggal 16 januari 2014
- Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004. *Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*
- Kepmen PAN no 58 tahun 2002. *Tentang Dimensi Pelayanan Publik*.
- Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya